

**KINERJA KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung  
Selatan)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

**RISTI YULI PRAWESTI  
NPM 1421020030**

**Program Studi :Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439/2018**

**KINERJA KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung  
Selatan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

**RISTI YULI PRAWESTI**  
NPM 1421020030

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur., M.H

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439/2018**

## ABSTRAK

Kepala Desa memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik dan harapan masyarakat, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam perspektif fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa di desa Sidoharjo sudah berdasarkan atas Undang-Undang di atas kemaslahatan umat atau masyarakat secara fiqh siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis dengan *kualitatif*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparat desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : **Risti Yuli Prawesti**

NPM : **1421020030**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP.196908081993032002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H**  
**NIP.197512302003121002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
(Siyasah Syar'iyah)**

**Drs. Susiadi A.S., M. Sos. I**  
**NIP.195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Fiqh Siyasah** (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan) disusun oleh Risti Yuli Prawesti, NPM.1421020030, Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua sidang : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. EfaRodiahNur, M.H

(.....)

**DEKAN**

(.....)

**Dr. Amsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Q.S. An-Nisaa' (4):58<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 87

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
2. Kepada papaku yang tercinta Mardio (ALM),
3. Hartono dan Siti Muji Mubariyah sebagai ayah dan mamaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada terhenti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lautan do'a, dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
4. Kakek dan nenekku tersayang
5. Paman dan bibiku tersayang
6. Keluarga besarku tersayang
7. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Risti Yuli Prawesti, lahir pada tanggal 13 Juli 1996 di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Anak tunggal dari pasangan Bapak Mardio dan Ibu Siti Muji Mubariyah.

Pendidikan yang pernah di tempuh

1. SDN 01 Sidoharjo (Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2008
2. MTS N 01 Sidoharjo (Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2011
3. SMA N 01 Kalianda (Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekarang telah bertransisi menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanyatanya membumi.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
  8. Untuk Faruq Abdullah yang selalu memberikan dukungan dan semangat
  9. Untuk sahabat-sahabat yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu: Anjeli Adelina.F.Z, S.H, Reka Marsela., S.H., Meila Iskatriilia, S.H., Nabila Puspita, S.H., Vera Agus Indriyani, S.H., dan Rena Septiyana, S.H.
  10. Sahabat seperjuangan yaitu keluarga besar Siyasah A angkatan'14
  11. Keluarga besar KKN 99 Desa Palas Aji Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan yang telah menemani selama 40 hari
  12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
- Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, Februari 2018  
Penulis

**Risti Yuli Prawesti**

NPM.1421020030

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah .....	14
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	14
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	18
B. Siyasah Dusturiyah.....	23
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	23
2. Konsep-konsep Penting dalam Sejarah Pemerintahan Islam .....	26
C. Pemerintahan Desa.....	34
1. Pengertian Pemerintahan Desa .....	34
2. Pemerintah Desa .....	39
3. Kinerja Kepala Desa.....	49
 <b>BAB III LAPORAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Kondisi Geografis .....	60
2. Kondisi Demografi.....	61
3. Sarana dan Prasarana.....	66
B. Apa saja Kinerja Kepala Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan .....	70

#### **BAB IV ANALISIS**

- A. Kinerja Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji  
Kabupaten Lampung Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Desa.....77
- B. Kinerja Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji  
Kabupaten Lampung Selatan Perspektif Fiqh Siyasah .....80

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....83
- B. Saran.....84

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul **“KINERJA KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Kinerja merupakan kemampuan kerja.<sup>2</sup> Kemampuan kerja yang baik sebagai seorang pemimpin yang dapat dicontoh oleh masyarakat.
2. Kepala Desa/desa adat yang disebut dengan nama lain kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan desa.<sup>3</sup>
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu Undang-Undang yang membahas tentang Desa.

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 700

<sup>3</sup>Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>4</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul “Kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan meninjau kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini dalam UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang penunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

---

<sup>4</sup> A.Dijazuli. *fiqih Siyasah*, Prenada Media, Jakarta. 2000, hlm.42.

- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkat paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama Pemerintah Desa. Pemerintah Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Aparat Desa. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, diantaranya dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan pedesaan itu Desa akan menjadi maju.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatnya daya saing Desa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>6</sup> Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa. Agar program Pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pembangunan desa.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat dibutuhkan, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik, dan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa.<sup>7</sup>

Dalam pandangan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan

---

<sup>6</sup>Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>7</sup>M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) h. 44



kehidupan mereka. Hal ini dapat diukur melalui keberhasilannya dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam pemerintahannya. Implikasi atau dampak yang jelas dari kepemimpinan seorang Kepala Desa yang mempunyai kinerja yang baik dapat dievaluasi ketika dihadapkan pada suatu persoalan, termasuk merupakan fenomena dengan berbagai pandangan dari masyarakat.

Pemerintah Desa di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan dalam melaksanakan program pembangunan desa tidak adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Padahal dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan adanya asas keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan program pembangunan desa yang akan dijalankan. Tidak pernah ada pemasangan informasi seputar penggunaan dana desa di tempat-tempat strategis di lingkungan desa.

Kurangnya sikap keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya sehingga belum ada kesadaran masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. Seharusnya Kepala Desa merupakan pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakat dan benar-benar memperhatikan kondisi serta harapan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat, didalam kenyataan tidak ada sosialisai.

Dalam Fiqh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu

*khilafah* lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang Kepala Negara.<sup>8</sup> Dalam istilah *khilafah* digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (Khulafaur Rasyiddin).<sup>9</sup> Kata *khilafah* sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. *Khilafah* adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya.<sup>10</sup>

Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah SWT untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syaria Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia. Salah satu ketentuan syari’ah yang harus dilaksanakan tersebut adalah ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 59,<sup>11</sup> Allah swt berfirman:

أَطِيعُوا أَمْرًا مِّنَ الَّذِينَ يَتَأْتِي اللَّهَ إِلَىٰ فَرْدُهُ شَيْءٌ فِي تَنْزِعَةٍ مِّنكُمْ فَإِنْ مِّنكُمْ أَمْرٌ إِلَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
بِاتِّمَامٍ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ حَيْثُ ذَلِكُمْ إِلَّا حَرِّ وَالْيَوْمِ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu

---

<sup>8</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta:Kencana, 2003) h. 59

<sup>9</sup>Hepi Riza Zein, *Studi tentang Pemerintahan Khalifah Dauliah Islamiyah*, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 27

<sup>10</sup>A. Djazuli, *Loc. cit*, h.59

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 87

maka penulis memilih judul : **“KINERJA KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam perspektif fiqh siyasah?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan program pembangunan desa.
- b. Untuk menganalisis kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perspektif fiqh siyasah.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai masukan untuk Kepala Desa untuk memperbaiki kinerjanya agar menjadi pemimpin yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan desa.
- 2) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

a. Sifat penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan dalam proposal ini deskriptif analisis.

Yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau



lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya dalam melaksanakan program pembangunan desa di Desa Sidoharjo kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan yang di maksud tinjauan sendiri yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

#### b. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005) h. 58

<sup>13</sup>Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008) h. 24

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang diantaranya adalah perangkat pemerintahan desa seperti, Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, Bendahara, Kadus dan perangkat Desa lainnya, masyarakat Desa SidoharjoKec. Way Panji Kab. Lampung Selatan seperti Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa lainnya.

### b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik sampling dimana dari perangkat pemerintahan desa yang menjadi sampel dari perangkat desa dan masyarakat desa yaitu, 1 Kepala Desa, 5 orang Perangkat Desa, 3 orang Tokoh Masyarakat, dan 6 orang MasyarakatDesa.

## 3. Sumber Data.

### a. Data Primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

---

<sup>14</sup>Juliansyah. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2010) h. 147

<sup>15</sup>*Ibid*,h. 155

yang memerlukannya”<sup>16</sup>. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”<sup>17</sup>. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Libraby research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang benarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data<sup>18</sup>.

a. Wawancara.

---

<sup>16</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) h. 82

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 58

<sup>18</sup>Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.31

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Sidoharjo Kac. Way Panji Kab. Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>19</sup>
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

#### 6. Analisis Data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”<sup>21</sup>. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

---

<sup>19</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h 115

<sup>20</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h 45

<sup>21</sup>Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986) h. 112

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).<sup>22</sup>

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zanni*), hasil yang dicapai melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Fiqh berarti pemahaman sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *Al-Quran* dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Quran* dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melakukan hukum islam. Hasil

---

<sup>22</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h. 2

pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.<sup>23</sup>

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah itu didasarkan kepada *dalil tafsili* yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*.<sup>24</sup> Fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi an kondisi manusia itu sendiri.<sup>25</sup>

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munaqahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan Internasional).<sup>26</sup>

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah

---

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48-50

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-7

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Op. cit.*, h. 3

<sup>26</sup> *Ibid*

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.<sup>27</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "peraturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara dan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibnu mazhur mendefinisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyam al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan diwahyukan oleh Allah SWT."<sup>28</sup> Ibn 'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahastsi, memberi batasan:

*Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.*<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 26

<sup>28</sup>Muhammad Iqbal., *Op. cit.*, h. 4

<sup>29</sup>A. Djazuli., *Op. cit.*, h. 27

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.<sup>30</sup> Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya.<sup>31</sup> kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qath'i* baik *wuruq* maupun *dalalahnya*;
- b. Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan muradat
- c. kemaslahatan itu memabawa dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi mencapai

---

<sup>30</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10

<sup>31</sup> Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.66 (On-line), tersedia di : <http://www.ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (6 Desember 2018)

<sup>32</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

kemaslahan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para *mujtahid* tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>33</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasa dan metode. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai dengan kapasitas-kapaitas apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga dengan lembaga negara,

---

<sup>33</sup>Muhammad Iqbal, *Op. cit.*, h. 5

hubungan dengan negara lain, islam dengan non islam ataupun peraturan-peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam *al-Mawardi*, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qada'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Sumber hukum pertama adalah *Al-Quran*, berdasarkan objek pembahasaan ini pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:<sup>34</sup>

إِنَّ اللَّهَ  
إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ إِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ  
لِلَّهِ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمَ اللَّهُ ۖ بِصِيرَاسِمِيعًا كَانَ

Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

أَطِيعُوا أَمْرًا مَنْوَالَّذِينَ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَلَّا مَرُوا إِلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
بِاتُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ أَنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ ۖ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Loc. cit*



Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Sumber hukum kedua adalah hadist, berdasarkan objek pembahasan ini hadist yang membahas tentang kepemimpinan adalah

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ،  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
(متفق عليه)

Artinya: *Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.*<sup>35</sup>

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qada'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara),

---

<sup>35</sup>(H.R. Bukhari dan Muslim)

*siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu *siyasah qadla'iyyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), dan *siyaah Maliyyah* (keuangan negara).

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan moneter)
- d. *Siyasah Maliyan Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- e. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- f. *Siyasah Tanzfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- g. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan)<sup>36</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah disederhanakan menjadi tiga bagian pokok :

- a. *Siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan

---

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal., *Op. cit.*, h. 15

warga negara dan lembaga negara yan lain dalam batas-batas administratif suatu negara.<sup>37</sup> Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasry'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (politik luar negeri). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik anantara negara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-dauli al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai memangku tangan kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tudas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan nya perang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah* (politik ekonomi dan moneter) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,

---

<sup>37</sup>H.A. Djazuli ., *Op. cit.* h. 31

perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

## B. Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Permasalahan di *fiqh siyasah dusturi* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lainserta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Fiqh siyasah dusturi* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>38</sup>

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat *Al-Quran* maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamosator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

---

<sup>38</sup><http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyi'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daeran, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>39</sup>

Di dalam Fakultas Syariah digunakan istilah *fiqh dusturi*, yang di maksud dengan dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi menafsirkan *dusturi* dengan "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".

Penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai unsur *dustur* dalam sutu negara sudah tentu perundang-

---

<sup>39</sup>H.A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 47-48

undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* tentu pertama-tama adalah *Al-Quran* al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran *Al-Quran*. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan *immah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Sumber ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu di dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqasdid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu:

- a. *Hifdh al-din* (memelihara agama)
- b. *Hifdhal-nafs* (memelihara jiwa)
- c. *Hifdhal-aql* (memelihara akal)
- d. *Hifdhal-mal* (memelihara harta)
- e. *Hifdhal-nasl* (memelihara keturunan)
- f. *Hifdhal-ummah* (memelihara umat)

Terakhir sumber dari *fiqh dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Al-Quran* dan hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahhihah*.<sup>40</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (*hablumminallah*) maupun hubungan dengan manusia manusia (*hablumminannas*), termasuk diantaranya masalah kepemimpinan di pemerintahan. Karena kepemimpinan merupakan suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, dan baik. Tugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana.

## 2. Konsep-Konsep Penting dalam Sejarah Pemerintahan Islam

### a. Imamah

Dalam wacana *fiqh siyasah*, kata *imamah* (imamah) biasanya diidentikkan dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam kalangan Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer

---

<sup>40</sup>H.A. Djazuli, *Op. cit.*, h.53-55



penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara dua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang *khilafah*. Hal ini antara lain dilakukan oleh *Abu al-Hasan al-Mawardi*. Di antara pemikir Sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi *al-imamah al-Uzhma* untuk pengertian ini.<sup>41</sup>

Penegakan institusi *imamah* dan *khilafah*, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan islam. Menurut *al-Mawardi*, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan *al-Mawardi*, 'Audah mendefinisikan bahwa *khilafah* atau *imamah* adalah kepemimpinan umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam.

Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan, ayat yang menunjukkan imam sebagai ikutan yang baik disebut di dalam<sup>42</sup> QS. al-Anbiya(21) 73 :

---

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal.,*Op. Cit*, h. 149

<sup>42</sup>H. A. Djazuli.*Op. Cit*. h. 55

نَلَاوْكَانُوا الزَّكَاةَ وَإِيَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهُدُونَ أَيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ

عَبِيدِ

Artinya :*Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin haruslah menegakkan peraturan-peraturan berdasarkan perintah Allah dan berdasarkan risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW., mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan berdasarkan risalah risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi utama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapa pun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karena orang yang menggantikannya (Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan *Khalifah (Khalifah Rasul Allah=Pengganti Rasulullah)*.<sup>43</sup>

Dalam pandangan islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat pisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Sementara dalam praktiknya, para *khalifah* di dunia islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan

---

<sup>43</sup>Muhammad Iqbal, *Op. cit.* h. 150

pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus.

#### b. Khalifah

Istilah *khalifah* berasal dari kata Arab *khalafa*, yang berarti datang setelah atau menggantikan. Karena itu khalifah berarti pengganti atau penerus. Istilah *khalifah* pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Di sana kata *khalifah* tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan. Kata khalifah muncul dua kali dalam *al-Quran*, yakni dalam surah al-Baqarah ayat 30 yang mengacu kepada Nabi Adam dan dalam surat shad ayat 26 yang merujuk kepada Nabi Daud.

Dalam sejarah ketatanegaraan islam, orang pertama yang mendapatkan gelar *khalifah* adalah Abu Bakar segera setelah ia terpilih sebagai pengganti Nabi Saqifah Bani Saidah. Gelar tersebut diberikan kepada Abu Bakar karena memang posisinya sebagai *khalifah* (pengganti) Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia dalam islam. Ia semata-mata diberikan karena merujuk posisi Abu Bakar yang memang sebagai *khalifah* atau pengganti Nabi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa *khalifah* itu sesungguhnya wakil Nabi, bukan wakil Allah.

Pada masa pemerintahan para *KhalifahAr-Rasyidin* mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional, yaitu:

- 1) Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syariat islam. Manusia di hadapan syariat Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk seorang siapapun dia;
- 2) prinsip musyawarah, yang diwajibkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadits-hadits Nabiyang shahih sebagai kewajiban keIslaman atas para penguasa dan rakyat;
- 3) prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban keIslaman
- 4) prinsip kejujuran bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar dan tidak akan tercipta saling tolong menolong antar keduanya
- 5) prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau daam maksiat
- 6) prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak berlaku adil
- 7) prinsip wajib jihad di jalan Allah, jihat di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya dimiliki khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya
- 8) prinsip menjauhi sifat yang khufur, umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sifat kufur. Tidak menekuni

semua perintah dan menjauhi semua larangannya. membawa mereka kepada kekuatan dan kelaparan.<sup>44</sup>

c. Ulil Amri

Secara etimologi, *ulil amri* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu: “ أُلِّل ” yang merupakan jamak dari “ أَمْر ” yang berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas.<sup>45</sup> Dan kata “ أَمْر ” yang dalam bentuk jamaknya “ أُمُور ” dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.<sup>46</sup> Dengan demikian, secara etimologi *ulil amri* adalah yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan/pekerjaan.

*Ulil Amri* menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa *ulil amri* itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan semua yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.<sup>47</sup>

Kata-kata *amir* tidak ditemukan di dalam *Al-Quran* meskipun kata *umara* banyak disebut *Al-Quran* yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintahan, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan *imam-imam* mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari

---

<sup>44</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 6

<sup>45</sup>Ahmad Sunarto, *Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – Inggris* (Rembang: Halim Jaya, 2012) hlm. 756

<sup>46</sup>*Ibid.* h 13

<sup>47</sup>Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (<http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>) di akses pada tanggal 2 Juni 2018, waktu 10:00

*fiqh dusturi* adalah *ahlul halli wal aqdi*, akan tetapi kata *amir* digunakan dalam hadist dan rupanya juga dikenal dikalangan para sahabat. karena waktu terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Orang-orang anshor pernah berkata:

*“Dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir”*

Kata-kata lainnya yang lebih tegas menunjuk kepada penguasa/raja adalah kata *malik/mulk* dalam az-Zukhruf (43):51

﴿تُبْصِرُونَ أَفَلَا تَنظُرُونَ ۚ أَلَمْ تَجْرَىٰ الْأَنْهَارَ وَهَذِهِ مِصْرُ مُلْكِكُمْ ۖ أَلَيْسَ يَقُولُ قَوْمِي فِي فِرْعَوْنَ وَنَادَىٰ

Artinya :Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir Ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai Ini mengalir di bawahku; Maka apakah kamu tidak melihat(nya)?

Para ulama fiqh dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi ulilamri yang dimaksudkan di dalam dua ayat dari surah an-Nisa'. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: “Ulil amri adalah ulama.” Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: “Mereka adalah para pemimpin.” Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.

Ibnu Taimiyah berkata: “Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil amri

ada dua macam yaitu ulama dan umara. Apabila mrka bagus maka manusia akan bagus. Namun bila dia rusak, pasti manusia akan rusak pula.”

Syaikh Mahmud Syaltut berkata: “ulil amri adalah para ahli pikir yang diknal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan *ijtihad* atau apa yang trkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.”<sup>48</sup>

Ulil amri yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman seperti itu (memahami ulil amri adalah elite umara dan penguasa), yang dijadikan sebagai sarana untuk menundukkan rakyat terhadap peenguasa sekalipun dia *zalim* atau bodoh dan perusak.

Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan ulil amri dengan “mereka - -sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah—ada dua golongan:

- a. Ulil amri keagamaan, yaitu para *mujtahid* dan ahli fatwa (mufti)
- b. Ulil amri kduniaan, yaitu meerka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan eksekutif dan legislatif.

Pengarang *Tafsir Al-Manar* berpendapat bahwa *al-Quran* menyebut orang-orang yang mewakili rakyat itu dengan ulil amri, yakni orang yang

---

<sup>48</sup>Farid Abdul Khaliq. *Op. cit.* h. 83



memikul tanggungjawab urusan-urusan rakyat yang menjadi rujukan mereka dalam kemaslahatan mereka. Dan mereka merasa tentram dengan mengikuti mereka.<sup>49</sup>

Terakhir, kata *sulthan* yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang penguasa, bukan di Indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal dari pada *Khalifah*, *Imam*, *Malik*, atau *Amir*. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi *sulthan* tetapi “sultan”. Kata-kata *sulthan* yang menunjuk kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis.<sup>50</sup>

### C. Pemerintahan Desa

#### 1. Pengertian Pemerintahan Desa

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk

---

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>A. Djazuli, *Op. cit*, h 59-60

dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar<sup>51</sup>.

Desa dalam stuktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan<sup>52</sup>, bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat<sup>53</sup>.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa

---

<sup>51</sup>Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) h 21

<sup>52</sup>Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung, Angkasa, 1991) h 43

<sup>53</sup>Khairudin Tahmid, *Op.cit*, h 20

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa<sup>54</sup>. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggara desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Akuntabilitas adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>54</sup>Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2017). h. 132

- h. Efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan yang harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.<sup>55</sup>

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukan rumusannya secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945. Yang diatur di dalam UUD NRI tahun 1945 justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisuinalnya, sebagai mana tertulis dalam Pasal 18B ayat (2). Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah di atur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa pengaturan tentang desa diintegrasikan ke dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

---

<sup>55</sup>Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lebih lanjut Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat adat saat ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, peraturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Tujuan ditetapkan pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama

- e. membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif terbuka, serta tanggungjawab.
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. meningkatkan ketatanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketatanan nasional
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>56</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam pengaturan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah yang melaksanakan pemerintahan desa, terdiri atas:

---

<sup>56</sup>Ni'matulHuda, Hukum Pemerintahan desa (Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, (Malang: Setara Press, 2015) h. 211

a. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 55 ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
- 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup> Badan perwakilan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Badan Permusyawaratan Desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.

---

<sup>57</sup>Yusnani Hasyimzoem, *Op. Cit.* h. 135



Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 UU Nomor 6 tahun 2014 adalah:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah
- 4) berpendidikan paling rendah taman sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 7) wakil penduduk Desa yang di pilih secara demokratis

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat persamaan, serta meningkatkan partisipasi dalam perkembangan masyarakat, Pemerntahan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan desa masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan dari perangkat Pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan Desa. hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi: a) Penataan desa; b) Perencanaan desa; c) Kerja sama desa; d) Rencana investasi yang masuk ke desa; e) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f) Penambahan dan pelepasan aset desa; dan g) Kejadian luar biasa. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, musyawarah desa dibiayai dari APBDesa.<sup>58</sup>

Selanjutnya Pasal 61 diatur mengenai hak dari Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>58</sup>Ni'matulHuda., *Op. cit.* h.215-216

- 3) mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sedangkan dalam Pasal 62 anggota BPD berhak:

- 1) mengajukan usul rancangan peraturan desa
- 2) mengajukan pertanyaan
- 3) menyampaikan usul dan/atau pendapat
- 4) memilih dan dipilih
- 5) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam Pasal 63 ditegaskan bahwa anggota BPD memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- 4) mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- 5) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
- 6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

Dalam Pasal 64 Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa
- 2) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- 3) menyalahgunakan wewenang
- 4) melanggar sumpah/janji jabatan
- 5) merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa
- 6) merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- 7) sebagai pelaksana proyek desa
- 8) menjadi pengurus partai politik
- 9) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang<sup>59</sup>

b. Perangkat Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, tenaga-tenaga yang mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di dalam organisasi pemerintahan desa. Ada beberapa jabatan struktural di lingkungan<sup>60</sup> pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya

---

<sup>59</sup>Yusnani Hasyimzoem dkk, h.138

<sup>60</sup>Taliziduhu Ndraha, Op.cit, h 92

dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:

- 1) Sekertaris desa yang dipimpin oleh sekertaris desa
- 2) Pelaksana kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional
- 3) pelaksana teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi<sup>61</sup>

Perangkat desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam Pasal 51 ditegaskan bahwa:

- 1) merugikan kepentingan umum
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- 4) melakukan tindak diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- 6) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- 7) menjadi pengurus partai politik
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- 9) merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

---

<sup>61</sup>Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa* (Bandar Lampung, Sai Wawai, 2016) h 15

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- 10) Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>62</sup>

Pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut:

**Pasal 64**

- 1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Yusnani Hasyimzoem dkk, *Op, cit.*, h. 141

Pasal 66 dan Pasal 67 juga mengatur tentang pengangkatan perangkat Desa yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 67

- 1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

---

<sup>63</sup>Bambang Suryadi, Op.cit, h 56

- 2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>64</sup>

Pemberhentian Perangkat Desa diatur juga dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yaitu sebagai berikut:

Pasal 68

- 1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- 2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Bambang Suryadi, Op.cit, h 57



- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.<sup>65</sup>

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang bersumber dari APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui ADD.<sup>66</sup>

### 3. Kinerja Kepala Desa

#### a. Kinerja

Dalam melakukan suatu penilaian kerja seseorang diperlukan tolak ukur, dan tolak ukur tersebut adalah standar. Sebuah standar dapat dianggap

---

<sup>65</sup>Bambang Suryadi, Op.cit, h 57-58

<sup>66</sup>Bambang Suryadi, Op.cit, h 15-16

sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah modal untuk diperbandingkan, suatu alat akan membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Dengan penentuan standar untuk berbagai penentuan maka timbul yang disebut "standarisasi", yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe dan gayatertentu berdasarkan suatu komposisi standar yang telah ditentukan.

Dalam penelitian penyelesaian pekerjaan, penilaian menggunakan standar sebagai alat ukur yang dicapai dan perilaku yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Indikator untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada delapan indikator, yaitu menurut Gomes sebagai berikut:

1) *Quantity of work* (Kuantitas Kerja)

Merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan

2) *Quality of work* (Kualitas Kerja)

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

3) *Jow Knowledge* (Pengetahuan Kerja)

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan

4) *Creativeness* (Kreativitas)

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan keterampilan

5) *Cooperation* (Kerjasama)

Kesediaan bekerjasama dengan orang lain

6) *Dependability* (Keteguhan)

Kesaaran dan dapat dipercayakan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja

7) *Initiative*(Prakarsa)

Semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggungjawabnya

8) *Personal Qualities* (Kualitas Pribadi)

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi.<sup>67</sup>

Unsur prestasi seseorang yang akan dinilai oleh setiap organisasi atau perusahaan tidak selalu sama, tetapi pada dasarnya unsur-unsur yang dinilai itu mencakup seperti hal-hal diatas.

Dari uraian nampak bahwa faktor yang digunakan untuk menilai tingkat prestasi seseorang tidak sama untuk semua perusahaan, tetapi pada dasarnya apa yang telah dikemukakan merupakan faktor-faktor yang lazim digunakan dalam menilai prestasi seseorang.

b. Kepala Desa

Kepala desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat. Kepala desa adalah pimpinan

---

<sup>67</sup>Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 134

tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah dituntukan oleh undang-undang. Dengan demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala desa/Desa adat.<sup>68</sup>

- 1) sebutan Kepala desa/Desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal
- 2) Kepala desa/Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat.
- 3) Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal
- 4) pencalonan Kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.<sup>69</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>70</sup> Yang dimaksud menyelenggarakan pemerintahan desa antara lain mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan kelembagaan kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antardesa. Sedangkan yang dimaksud dengan melaksanakan pembangunan desa antara lain upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, irigasi desa, pasar desa. Maksud dari pembinaan

---

<sup>68</sup>Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014

<sup>69</sup>Ni'matulHuda., *Op. cit.* h.

<sup>70</sup>Yusnani Hasyimzoem, dkk., *Op. cit.* h. 134

kemasyarakatan desa antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>71</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa memiliki wewenang, yaitu:

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dari aset desa.
- 4) menetapkan peraturan desa.
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6) membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

---

<sup>71</sup>Didik G. Suharto., Membangun Kemandirian Desa. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). h. 196

- 9) mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya ,masyarakat desa.
- 12) mengkoordinasikan penggunaan desa secara partisipatif
- 13) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 14) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa memiliki hak:

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- 3) menerima penghasilan tetap setia bulan, tunjangan dan penerimaan yang lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- 4) mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- 5) memberi mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.<sup>73</sup>

Dalam melaksanakan tugas, Kepala desa berkewajiban:<sup>74</sup>

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta

---

<sup>72</sup>Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>73</sup>Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>74</sup>Pasal 26 Ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

- 2) mengangkat kesejahteraan masyarakat desa
- 3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,  
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari  
kolusi, korupsi, dan nepotisme
- 7) menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku  
kepentingan di desa
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- 9) mengelola keuangan dan aset desa
- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan  
lingkungan hidup
- 16) memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:<sup>75</sup>

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir jabatan kepada Bupati/Walikota
- 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Selain memiliki tugas dan wewenang, kepala desa juga dilarang melakukan hal yang diatur dalam Pasal 29, yaitu:

- 1) merugikan kepentingan umum
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- 4) melakukan tindak diskriminatif terhadap warga desa dan/atau golongan masyarakat tertentu
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa

---

<sup>75</sup>Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



- 6) melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang , barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- 7) menjadi pengurus partai politik
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 10) ikut serta dan/atau dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan, dan
- 12) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.<sup>76</sup> Dalam Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014, calon Kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- 1) warga negara Republik Indonesia
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>76</sup>Didik G. Suharto., *Op. cit.* h.196

- 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal Ika
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ada saat mendaftar
- 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa
- 7) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- 9) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipenjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 11) berbadan sehat
- 12) tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
- 13) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala desa terpilih. Badan Permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Calon Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.<sup>77</sup>

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa berhenti karena tiga hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Didik G. Suharto., *ibid*

<sup>78</sup>Yusnani Hasyimzoem, dkk., *Op. cit.* h.137

### BAB III

## LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Batas Wilayah

Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu desa yang berada di sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan dan memiliki letak yang tidak jauh dari Ibu Kota Kecamatan.

Jarak Desa Sidoharjo Ibu Kota Kecamatan :  $\pm 1$  KM

› Waktu tempuh :  $\pm 3$  Menit

Jarak dari Desa Sidoharjo ke Ibu kota Kabupaten :  $\pm 15$  KM

› Waktu tempuh :  $\pm 15$  Menit

Adapun batas-batas wilayah Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sidoreno Kecamatan Way Panji

Sebelah Selatan : Desa Waringin Harjo Kecamatan Kalianda

Sebelah Timur : Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji

Sebelah Barat : Desa Napal Kecamatan Sidomulyo

###### b. Luas Wilayah dan Topografi

Luas Desa Sidoharjo adalah 3450,00 Hektare, secara topografis Desa Sidoharjo sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah daratan dengan ketinggian dari permukaan laut kurang dari 100 Meter.

- Pemukiman : 2338,5 Ha

- Pertanian sawah tadah hujan : 817,5 Ha
- Pekarangan, Tegal/Kebon : 279,25 Ha
- Tanah keperluan fasilitas umum : 5 Ha
- Tanah keperluan fasilitas sosial : 9,75 Ha

## 2. Kondisi Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Desa Sidoharjo di huni oleh berbagai suku seperti: lampung, jawa, bali, sunda dan suku lainnya. Pada awal Tahun 2017 Desa Sidoharjo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 13.721 jiwa, yang terdiri dari :

Laki-laki : 7.265 jiwa  
 Perempuan : 6.456 jiwa  
 Kepala Keluarga : 3.853 KK

### b. Pertumbuhan penduduk

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Tahun Lalu (awal Tahun 2016)	13.511
2	Jumlah Penduduk Tahun Ini (awal Tahun 2017)	13.721

### c. Data keagamaan

No	Pemeluk Agama	Keterangan
1	Islam	10.783
2	Katholik	579

3	Kristen/Protestan	827
4	Hindu	1.532

### 3. Kelembagaan

#### a. Lembaga Pemerintah

##### 1) Pemerintah Desa Sidoharjo

NO	N A M A	JABATAN
1	Marjana	Kepala Desa Sidoharjo
2	Titik Handayani	Sekretaris desa Sidoharjo
3	Priyo Heri H	Kasi Pemerintahan
4	Dyah Anggraini	Kasi Pelayanan
5	M. Arif P.	Kasi Kesejahteraan
6	Krisna Nova L	Kaur Umum & TU
7	Devi H	Kaur Keuangan
8	Darminto	Kaur Perencanaan

##### 2) Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo (BPD)

NO	N A M A	JABATAN
1	Wayan Suadi	Ketua
2	Yusuf Suwarno	Wakil Ketua
3	M. Syafrizal	Sekretaris

4	Astono	Anggota BPD
5	Jatmaka	Anggota BPD
6	Heri M	Anggota BPD
7	Wayan Gede B	Anggota BPD
8	Jahri	Anggota BPD
9	Mujahidin	Anggota BPD

### 3) Perangkat pemerintahan Desa Sidoharjo

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Trimin	Kadus I (Solo)	<i>Membawahi 5 RT</i>
2	Marijo	Kadus II (Kediri)	<i>Membawahi 3 RT</i>
3	Suwarno	Kadus III (Bandung)	<i>Membawahi 2 RT</i>
4	Ngatio	Kadus IV (Surabaya)	<i>Membawahi 3 RT</i>
5	Sumarno	Kadus V (Jogja)	<i>Membawahi 4 RT</i>
6	Mahmudi	Kadus VI (Semarang)	<i>Membawahi 4 RT</i>
7	Wayan Subagio	Kadus VII (Bali Sidoharjo)	<i>Membawahi 5 RT</i>
8	Sukamto	Kadus VIII (Sidomukti)	<i>Membawahi 4 RT</i>
9	Edi Subowo	Kadus IX (Sidolaras)	<i>Membawahi 4 RT</i>
10	Wito	Kadus X (Rejomulyo)	<i>Membawahi 3 RT</i>
11	Supriyadi	Kadus XI (Sidorahayu)	<i>Membawahi 2 RT</i>
12	Sudarno	Kadus XII (Pasar)	<i>Membawahi 2 RT</i>

b. Lembaga Kemasyarakatan

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

NO	N A M A	JABATAN
1	Ady Muhayatsyah	Ketua
2	Ketut Bagus S	Wakil Ketua
3	Haryanto	Sekretaris

2) Rukun Tetangga (RT)

NO	N A M A	JABATAN
1	Usin	Ketua RT. 001 Dusun I
2	Tumino	Ketua RT. 002 Dusun I
3	Suwarto	Ketua RT. 003 Dusun I
4	Sunari	Ketua RT. 004 Dusun I
5	Simin	Ketua RT. 005 Dusun I
6	Suwandi	Ketua RT. 001 Dusun II
7	Suyono	Ketua RT. 002 Dusun II
8	Wahyudi	Ketua RT. 003 Dusun II
9	Mardiono	Ketua RT. 001 Dusun III
10	Jainal A	Ketua RT. 002 Dusun III
11	Sarman	Ketua RT. 001 Dusun IV
12	Subangi	Ketua RT. 002 Dusun IV
13	Supriatin	Ketua RT. 003 Dusun IV
14	Jamal W	Ketua RT. 001 Dusun V



15	Suyoto	Ketua RT. 002	Dusun V
16	Samadi	Ketua RT. 003	Dusun V
17	Derdi	Ketua RT. 004	Dusun V
18	Dasiman	Ketua RT. 001	Dusun VI
19	Sriyanto	Ketua RT. 002	Dusun VI
20	Sagino	Ketua RT. 003	Dusun VI
21	Karmidi	Ketua RT. 004	Dusun VI
22	I Ny. Suwibawa	Ketua RT. 001	Dusun VII
23	I Wy. Ludra	Ketua RT. 002	Dusun VII
24	Wy. Budi Tresno	Ketua RT. 003	Dusun VII
25	Ny. Limiarto	Ketua RT. 004	Dusun VII
26	Rustam	Ketua RT. 005	Dusun VII
27	Saimun	Ketua RT. 001	Dusun VIII
28	Jamal	Ketua RT. 002	Dusun VIII
29	Jarno	Ketua RT. 003	Dusun VIII
30	Jumikan	Ketua RT. 004	Dusun VIII
31	Marikun	Ketua RT. 001	Dusun IX
32	Kusnan	Ketua RT. 002	Dusun IX
33	Latif	Ketua RT. 003	Dusun IX
34	P. Astiti	Ketua RT. 004	Dusun IX
35	Sarman	Ketua RT. 001	Dusun X
36	Wagisan	Ketua RT. 002	Dusun X

37	Imam B.	Ketua RT. 003	Dusun X
38	Dafid	Ketua RT. 001	Dusun XI
39	Ahmad A.	Ketua RT.002	Dusun XI
40	Suharno	Ketua RT. 001	Dusun XII
41	Solip	Ketua RT. 002	Dusun XII

#### 4. Sarana dan Prasarana

##### a. Sarana/Prasarana Agama

Masyarakat Desa Sidoharjo kurang lebih 80% menganut agama islam, dan kurang lebih 20% menganut agama lain, diantaranya seperti agama hindu, katholik, dan kristen/protestan.

No	Nama Dusun	Masjid	Mushallah	Gereja	Pura
1	Dusun I Solo	3	2		
2	Dusun II Kediri		3	1	
3	Dusun III Bandung	1	1		
4	Dusun IV Surabaya		2		
5	Dusun V Jogja	1	3		
6	Dusun VI Semarang	1	4		
7	Dusun VII Bali Sidoharjo		1		1
8	Dusun VIII Sidomukti	3	1	1	
9	Dusun IX Sidolaras	1	2		
10	Dusun X Rejomulyo	3		1	
11	Dusun XI Sidorahayu	1	1		

12	Dusun XII Pasar		3	1	
----	-----------------	--	---	---	--

b. Sarana/Prasarana Pendidikan

Desa Sidoharjo mempunyai beberapa prasarana pendidikan yang tersebar di beberapa dusun, mulai dari PAUD sampai Sekolah Menengah Atas dengan rincian sebagai berikut :

NO	SARANA/PRASARANA	LOKASI
1	PAUD Melati	Solo
2	PAUD Aisyah	Bandung
3	PAUD Pelita	Pasar
4	T.K. Bina Asih	Sidomukti
5	T.K. Ma'arif	Semarang
6	T.K. Kartini	Jogja
7	T.K. Harapan Bangsa	Sidorahayu
8	SD Negeri 1 Sidoharjo	Semarang
9	SD Negeri 2 Sidoharjo	Bali Sidoharjo
10	SD Negeri 3 Sidoharjo	Sidomukti
11	SD Negeri 4 Sidoharjo	Solo
12	MI Ma'arif Sidoharjo	Semarang
13	SMP Negeri 1 Sodoharjo	Sidomukti
14	MTs. Negeri	Jogja
15	SMP Swasta	Solo
16	MTs. Ma'arif Swasta	Semarang

17	MA. Swasta	Semarang
18	Pondok Pesantren	Semarang

c. Sarana/Prasarana Kesehatan

Disamping prasarana pendidikan Desa sidoharjo juga mempunyai beberapa prasarana kesehatan dengan rincian :

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KET
1	Puskesmas	1 Unit	Aktif
2	Praktek Dokter	4 Unit	Aktif
3	Posyandu	6 Unit	Aktif
4	Klinik KB	11 Unit	Aktif
5	Apotik/Depot obat	2 Unit	Aktif

d. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sidoharjo adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang di lakukan masyarakat Desa Sidoharjo adalah jenis tanaman padi, jagung, singkong, cengkeh, pala, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Tetapi yang menjadi produksi tanaman utama para petani di Desa Sidoharjo adalah jenis tanaman padi dan jagung. Di samping itu, sebagian masyarakat Desa Sidoharjo melakukan usaha lain seperti,

perdagangan, pengrajin/industri kecil, buruh bangunan, pengangkutan, peternak, dan budidaya ikan air tawar.<sup>79</sup>

Masyarakat Desa Sidoharjo menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang menganut tata pergaulan sosial dalam masyarakat Desa. Masyarakat Desa juga menganut Tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan adat pernikahan, masyarakat Desa juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan Desa dalam membangun Desa.<sup>80</sup>

#### e. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Sidoharjo, kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Sidoharjo sudah rata-rata di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Sidoharjo menggunakan sarana transportasi yakni, kendaraan motor, mobil pekap, truk yang berpropesi setiap harinya, dalam keseharian kendaraan tersebut dapat di gunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat di gunakan untuk mengangkut barang dagangan dan hasil panen masyarakat desa.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Mujo selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec.Waypanji Kab.Lampung Selatan, pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 08.45 WIB

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Hartono selaku Tokoh Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec.Waypanji Kab.Lampung Selatan, pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 13.20 WIB

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Glondor selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec.Waypanji Kab.Lampung Selatan, pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 10.45 WIB

Sarana komunikasi di Desa Sidoharjo sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh, masyarakat juga dapat menerima berbagai informasi dan berita-berita lainnya melalui televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

## **B. Kinerja Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan**

Pada bagian ini dibahas mengenai kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mempermudah serta mengarahkan penelitian ini, maka fokus penelitian mengenai kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan Desa Sidoharjo.

Dilihat dari kuantitas kerja Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sidoharjo, jumlah kerja pembangunan dari Kepala Desa ada 4 program yang direncanakan sudah ada 3 program yang selesai yaitu: Perbaikan jalan, irigasi dan sumur bor. Dan masih ada program pembangunan yang belum selesai.

Menurut Susianto, salah satu masyarakat Desa Sidoharjo mengatakan bahwa: Kepala Desa dan aparatur Desa sudah berusaha mensukseskan program pembangunan supaya semua terlaksana, tapi Kepala Desa dan aparatur desa kurang ikutserta dalam melaksanakannya sehingga masyarakatpun kurang berpartisipasi.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Susianto selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 08.15 WIB.

Kuantitas kerja Kepala Desa dilihat dari jumlah kerja yang dihasilkan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pembangunan sudah baik dapat dilihat dari suksesnya beberapa pelaksanaan pembangunan.

Dilihat dari kualitas kerja Kepala Desa di Desa sidoharjo dalam melaksanakan program pembangunan dilihat sudah baik. Seperti hasil yang di dapat dari beberapa informan dibawah ini.

Menurut Ahmad, salah satu masyarakat Desa sidoharjo mengatakan bahwa: kualitas kerja Kepala Desa cukup baik karena sudah ada beberapa pembangunan yang berhasil, saya berharap Kepala Desa bisa menyelesaikan semua program yang telah dibuat sebelum habis masa jabatannya.<sup>83</sup>

Menurut Titik Handayani, selaku sekretaris Desa sidoharjo mengatakan: kualitas kerja Kepala Desa cukup baik karena saya melihat Kepala Desa selalu memberikan pembinaan serta arahan terhadap Badan Pemusyawara Desa (BPD) dalam rangka bersama-sama dalam memberikan motivasi terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa. Pembinaan serta arahan biasanya dilakukan disetiap kali ada kesempatan pertemuan antara Kepala Desa dengan kami aparatur Desa dan LPM maupun BPD.<sup>84</sup>

Menurut Marjana, selaku Kepala Desa sidoharjo mengatakan bahwa: dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa tampaknya sangat baik dan efektif hal ini dapat dilihat bilamana setiap ada pertemuan bahkan rapat koordinasi yang biasanya dilakukan saya selalu

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Ahmad selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 08.30 WIB.

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan Titik Handayani selaku Sekretaris Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB.

memberikan arahan kepada setiap ketua dan anggota LPM dan BPD untuk bersama-sama memberikan motivasi kepada masyarakat dan bersama-sama turut serta dalam melaksanakan pembangunan Desa demi terciptanya pembangunan yang lebih baik.<sup>85</sup>

Kepala Desa harus memiliki kemampuan menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat Desa untuk bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan. Dilihat dari penelitian bagaimanakah pengetahuan kerja Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Ike, salah satu masyarakat Desa Sidoharjo mengatakan bahwa: Kepala Desa cukup baik dalam perencanaan pembangunan, karena sudah ada pembangunan yang sukses sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi ada satu program yang tidak berjalan sukses sehingga masyarakat sedikit kecewa, seperti contoh pembangunan pasar sudah banyak rumah-rumah yang di gusur tapi sampai sekarang pasar belum juga jadi.<sup>86</sup>

Menurut Haryanto, salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa: Pengetahuan kerja yang di miliki Kepala Desa cukup baik karena saya melihat Kepala Desa selalu berupaya mensukseskan setiap program pembangunan sesuai dengan yang paling dibutuhkan masyarakat, hanya saja Kepala Desa kurang ikut serta dalam melaksanakannya sehingga masyarakatpun kurang berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Marjana selaku Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 09.45 WIB.

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Ike selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 08.45 WIB.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan Haryanto selaku Tokoh Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 13.25 WIB.



PengetahuankerjaKepala Desa cukup baik dimata masyarakat karena Kepala Desa mampu merealisasikan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang sangat dibutuhkanmasyarakat.Hanya saja Kepala Desa kurang berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan.

Pada setiap acara pesta atau kegiatan dimana biasanya masyarakat berkumpul seperti acara pesta perkawinan dan acara kegiatan lainnya biasanya Kepala Desa selalu menggunakan kesempatan tersebut untukmenginformasikan setiap program-program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Menurut Darminto, selaku kaur perencanaan Desa sidoharjo mengatakan bahwa: Kepala Desa biasanya langsung mengajak dan memotivasi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi mensukseskan melaksanakan program/kegiatan pembangunanDesa.Bentuk motifasi kerja yang diberikan oleh Kepala Desa adalah memberikan dorongan dan menyerahkan tugas-tugas kepada bawahannya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.<sup>88</sup>

Menurut Anita, salah satu masyarakat Desa sidoharjo mengatakan bahwa: Kapala Desa dalam cara kerja itu kurang baik karena saya melihat Kepala Desa tidak kompak dengan aparatur Desa. Waktu saya mengikuti kerja bakti Kepala Desa tidak ikutsama-samabekerja,bahkan waktu kami semua sudah selesai bakerja Kepala Desa malah sudah tidak ada beliau sudah balik lebih awal.<sup>89</sup>

Dari hasil penelitian terkait cara kerja Kepala Desa dalam melaksanakan

---

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Darminto selaku kaur perencanaan Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 09.15 WIB.

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Anita selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 14.15 WIB.

pembangunan kurang baik, karena Kepala Desa tidak mampu menjalin kerja sama yang baik, hanya mendorong dan menggerakkan masyarakat dan aparatur Desa untuk bekerja bersama-sama tapi Kepala Desa tidak ikut serta dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Priyo Heri, selaku kasi pemerintahan Mengatakan bahwa: Kepala Desa banyak berperandam mensosialisasikan program-program pembangunan Desa bahkan selalu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam setiap program pembangunan Desa bahkan Kepala Desa memberikan arahan bahwa setiap pembangunan Desa yang terjadi semuanya demi kesejahteraan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat pula.<sup>90</sup>

Menurut Jainal, salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa: Saya belum bisa katakan puas karena semua program pembangunan yang diprogramkan belum semuanya selesai masih ada dua lagi yang belum selesai yang pertama yaitu jalan sumber produksi petani yang juga sekaligus jalan alternatif menghubungkan masyarakat Desa Sidomulyodengan Desa Sidoharjo yang kedua trotoar yang belum selesai pekerjaannya, saya selaku masyarakat mengharapkan keseriusan pemerintah Desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya.<sup>91</sup>

Dilihat dari keteguhan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan belum sepenuhnya berhasil karena masih ada pembangunan yang belum selesai. Dalam hal ini diharapkan Kepala Desa, aparatur Desa dan masyarakat dapat bekerja sama untuk tercapainya tujuan pembangunan Desa yang diinginkan.

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan Priyo Heri selaku Kasi Pemerintahan Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 09.30 WIB.

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan Jainal selaku Tokoh Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 13.50 WIB.

Menurut Sri, salah satu masyarakat Desa sidoharjo mengatakan bahwa: Kepala Desa selalu berupaya untuk memajukan program pembangunanDesahalinitelihat jelas bilamana setiap kesempatan atau adanya pertemuan pemerintah Desa dan masyarakat, Kepala Desa dengan semangatnya selalu mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan tapi sangat disayangkan saat Kepala Desa sangat semangat dalam program pembangunan tetapi tidak berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan. Seharusnya Kepala Desa berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan Desa sehingga setiap pembangunan yang telah direncanakan dapat terselesai dengancepat.<sup>92</sup>

Dilihat dari semangat kerja Kepala Desa dalam memotifasi masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan pembangunan sudah kurang baik dimata masyarakat dan aparatur Desa, Kepala Desa hanya mampu menonjolkan semangatnya dalam program pembangunan tetapi tidak dalam melaksanakan pembangunan.

Kepemimpinan Kepala Desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya pembangunan, karena merekalah ujung tombak dalam pembangunan di Desa bisa tercapai. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat, perilaku masyarakat, dan keyakinan mereka bahwa pembangunan tersebut akan membawa dampak terjadinya perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan tarap hidup mereka, melaksanakan pembangunan Desa akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta akan tumbuhswadayadankemandirianmasyarakat denganmengembangkanswadayamasyarakat sehingga akan menimbulkan

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Sri selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 14.45 WIB.

keserasian yang dinamis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang disepakatibersama.

Menurut Numiya, salah satu masyarakat Desa sidoharjo mengatakan bahwa: saya sangat merasakan bagaimana upaya Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam setiap program pembangunan Desa tapi hal ini berbanding kebalik dengan peran aktif Kepala Desa dalam melaksanakan beliau hanya mengandalkan masyarakat dan bawahannya.<sup>93</sup>

Dilihat dari kualitas pribadi Kepala Desa tidak berperan aktif dalam setiap melaksanakan pembangunan yang diadakan, Kepala Desa hanya mampu memberi program tanpa ikut serta dalam melaksanakannya.

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan Numiya selaku Masyarakat Desa di Desa Sidoharjo Kec. Waypanji Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 15.15 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Kinerja Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah berpengaruh besar terhadap Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa adanya asas keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal tersebut Kepala Desa belum melaksanakan asas keterbukaan yang seharusnya kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa sidoharjo memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dalam

Undang-Undang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 huruf (b) yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Kepala Desa telah mengangkat perangkat-perangkat Desa sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di Desa Sidoharjo. Adapun dalam melaksanakan pembangunan Kepala Desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat Desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu: perbaikan jalan, irigasi, dan sumur bor sedangkan program yang belum dilaksanakan yaitu: pembangunan pasar.

Dalam suatu program pembangunan Desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan harus ditumbuhkan rasa kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang diprogramkan atau dilaksanakan merupakan kebutuhan dan pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Masyarakat mampu memahami bahwa pembangunan desa itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator dan harus mampu berkomunikasi dan memotifasi semua elemen masyarakat baik pemuda, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan semua tokoh masyarakat guna mengerahkan semua potensi membangun desa. Kepala Desa juga harus menjalin kerja sama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat desa sehingga dalam melaksanakan pembangunan desa lebih efektif dan efisien.

Kepala Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sebagai jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Kepala Desa harus mampu membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat, serta harus memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat serta bisa melaksanakan pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Desa pada Pasal 1 ayat 8 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kinerja Kepala Desa sidoharjo dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa secara umum kurang optimal. Dilihat dari kinerjanya Kepala Desa Sidoharjo kurang aktif dan kurang berkomunikasi dan kurang bekerja sama dengan masyarakat sehingga minimnya partisipasi masyarakat di Desa Sidoharjo untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksanakan.

## **B. Kinerja Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Perspektif Fiqh Siyasah**

Pada dasarnya kinerja Kepala Desa ialah melaksanakan program pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotongroyong.

Pembangunan Desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian rakyat pulalah yang harus melaksanakan dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Al-Madudi mengatakan *khalifah* merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul. Gelar *khalifah* pertama kali digunakan oleh abu bakar kemudian Umar bin Khattob dengan gelar : *khalifah-khalifah* rasulullah : tetapi dia tidak menggunakan gelar ini, ia menyebut dirinya sebagai *amir al-mu'minin* (pemimpin para umat-umat mukmin. Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga digelar gelar *khalifah* rasul. Keempat khalifah ini lebih populer dengan sebutan *khulafaur rasyidin* ( khalifah-



khalifah yang mendapat petunjuk). Ada yang menyebutnya : *the pious caliph*” khalifah yang amat setia dan taat pada agama, dan shaleh”<sup>90</sup>

Kepemimpinan dalam Islam merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik. Manusia di muka bumi ini yang berkedudukan sebagai *khalifah* mempunyai amanat dari *rabbnya* untuk senantiasa menjalankan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Kerja sama antara pemimpin dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan guna melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dapat menjadi desa yang lebih baik

Pada dasarnya, yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam Islam adalah kebiasaan pokok dalam kepemimpinan yang merupakan tanggung jawab. Seluruhnya orang yang hidup di muka bumi ini dinamakan sebagaipemimpin.

Pembahasan sebelumnya Kinerja Kepala Desa Sidoharjo dalam melaksanakan program pembangunan umum kurang optimal dilihat dari kinerjanya Kepala Desa Sidoharjo kurang aktif dan kurang berkomunikasi bekerja sama dengan masyarakat sehingga minimnya partisipasi masyarakat di Desa sidoharjo untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun maupun yang belum terlaksanakan. Seharusnya seorang Kepala Desa memimpin masyarakat dengan baik dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan pada dirinya untuk kesejahteraan desa.

Kinerja Kepala Desa dilihat dari pandangan Islam tidaklah memenuhi ciri-ciri seorang pemimpin, yaitu : menjalankan amanah, Allah SWT berfirman Q.S Al-Anfal (8) 27 :

تَحُونُوا لآءَامَنُوا الَّذِيْنَ يَتَأَيُّهَا اللّٰهُ تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَحُونُوا لِّلرَّسُولِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidoharjo keccamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerja sama antara kepala desadan aparat desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankantugas sebagai pemimpin.

#### **B. Saran**

1. Ditujukan kepada pemerintah desa agar lebih terbuka dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, agarmasyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Ditujukan kepada Kepala Desa Sidoharjo hendaknya lebih optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga tercipta masyarakat desa yang jujur, bersih, dan tentram.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2003
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2011
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Ahmad Sunarto, *Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – Inggris*, Rembang: Halim Jaya, 2012
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010
- Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, Bandar Lampung, Sai Wawai, 2016
- Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Angkasa, 1991
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwiddan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Didik G. Suharto., *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Polotik Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2005

Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003

Hepi Riza Zein, *Studi tentang Pemerintahan Khalifah Dauliah Islamiyah*, LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran: Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, Jakarta: 1994

Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2010

Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Pradigma, 2005

Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004

M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, Jakarta : Raja Grafindo, 2013

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia : Pranadamedia Group, 2014

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Mohammad Rusfi, " Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.66 (On-line), tersedia di :

<http://www.ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (6 Desember 2018)

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Malang: Setara Press, 2015

Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986

Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (<http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>) di akses pada tanggal 2 Juni 2018, waktu 10:00

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. h. 132